

**OPTIMALISASI FUNGSI PAPAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA  
(ISPU) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA  
PEKANBARU.**

*Oleh : Afrida Br Sianipar*

*Pembimbing : DR. Febri Yuliani S.Sos., M.Si*

**Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293  
TELP.(0761)63277/23430**

*Abstract*

Kualitas udara merupakan penyangga kelangsungan hidup tidak hanya tumbuhan dan hewan tapi juga manusia sehingga komposisinya perlu dijaga tetapi saat ini kualitas udara yang telah berubah komposisinya akibat pencemaran udara sehingga tidak dapat menyangga kehidupan. Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan begitupun di Kota Pekanbaru. Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penghitungan dan pelaporan serta informasi Indeks standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari.

Berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997, penyampaian ISPU kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media massa dan elektronika serta papan peraga ditempat - tempat umum. Pencemar atau polutan di udara biasanya dikonversi menjadi satu nilai indeks yang ditampilkan pada stasiun pemantau udara ini dapat bersifat sebagai public awareness atau public warning.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Fungsi Papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan pengadaan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Namun fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih kurang Optimal. Faktor yang mempengaruhi fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah Sumber daya manusia, Koordinasi, Sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

***Kata Kunci: Optimalisasi, Fungsi ISPU, Kota Pekanbaru***

***Optimizing the Function of Air Pollution Standard Index (ISPU) by the Environment and Sanitation Service of Pekanbaru City.***

***Oleh : Afrida Br Sianipar***

***Pembimbing : DR. Febri Yuliani S.Sos., M.Si***

**Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293**

**TELP.(0761)63277/23430**

***Abstract***

*Air is an important component in human life. Air quality is a buffer of the survival of not only plants and animals but also humans so that the composition needs to be maintained but now the air quality has changed its composition due to air pollution so it can not support life. Air pollution is one of the many problems faced by urban areas as well as in Pekanbaru City. The Government issued a decision on the calculation and reporting and information of the Air Pollution Standards Index (ISPU). ISPUs are reports of air quality to the public to explain how clean or contaminated our air is and how it affects our health after breathing in the air for several hours or days.*

*Based on the decision of Environmental Impact Management Agency (Bapedal) Number KEP-107 / Kabapedal / 11/1997, ISPU delivery to the public can be done through mass media and electronics and boards in public places. Pollutants or airborne pollutants are usually converted into one index value displayed on these airborne stations can be either public awareness or public warning.*

*The purpose of this research is to know how Optimizing Function Board Air Pollution Standard Index (ISPU) by Environment and Sanitation Office of Pekanbaru City. This research was conducted by using qualitative research method, with descriptive data assessment. In data collection, researchers used interview techniques, observation, literature study and documentation.*

*The results of this study indicate that the Office of the Environment and Sanitation of Pekanbaru City has issued a policy of procurement of Air Pollution Standards Index (ISPU). But the function of the Air Pollution Standards Index (ISPU) is still less than optimal. Factors affecting the function of the Air Pollution Standards Index (ISPU) are Human Resources, Coordination, Socialization and community participation*

***Keywords: Optimization, ISPU Function, Pekanbaru City***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Udara merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Kualitas udara merupakan penyangga kelangsungan hidup tidak hanya tumbuhan dan hewan tapi juga manusia sehingga komposisinya perlu dijaga tetapi saat ini kualitas udara yang telah berubah komposisinya sehingga tidak dapat menyangga kehidupan.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan. Kualitas udara perkotaan di kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi kota yang tumbuh dan telah mendorong urbanisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas udara di perkotaan. Kebutuhan transportasi dan energimeningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk, perkembangan kota, dan berubahnya gaya hidup karena meningkatnya pendapatan.

Peningkatan konsumsi energi ini meningkatkan pencemaran udara yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi dan meningkatnya biaya kesehatan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sangat ironis apabila ternyata semakin merusak kualitas lingkungan khususnya udara yang semakin kotor dan tidak sehat.

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besaran dan jenis sumber pencemar seperti kegiatan industri, kegiatan transportasi dan lain-lain, masing-masing sumber pencemar

menghasilkan bahan pencemar yang berbeda baik dalam jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan.

Kualitas udara disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk indeks standar pencemar udara atau disingkat ISPU. ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.

Berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997, penyampaian ISPU kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media massa dan elektronika serta papan peraga ditempat - tempat umum. Pencemar atau polutan di udara biasanya dikonversi menjadi satu nilai indeks yang ditampilkan pada stasiun pemantau udara ini dapat bersifat sebagai public awareness atau public warning.

1. Public awareness terkait ISPU adalah peningkatan kesadaran masyarakat perihal kualitas udara untuk setiap harinya. Stasiun pemantau kualitas udara yang menerapkan sistem public awareness ini hanya seperti memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sekedar tahu dan lebih sadar (aware) akan kualitas udara dan kemungkinan pencemaran udara yang terjadi serta efeknya

terhadap masyarakat, lingkungan, dan makhluk hidup.

2. Public warning terkait ISPU adalah sarana peringatan dini bagi masyarakat terutama bila kualitas udaranya sudah masuk ke dalam golongan yang cukup berbahaya. Untuk stasiun pemantau kualitas udara yang menerapkan sistem public warning ini seringkali menyediakan data yang berada satu tingkat bahaya di atasnya agar masyarakat mendapatkan peringatan dan segera bertindak untuk menghindari terjadinya bahaya dari efek yang mungkin dihasilkan dari kualitas udara tersebut.

Indeks Standar Pencemar udara (ISPU) dapat digunakan sebagai :

1. Bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu.
2. Bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Indeks Standar Pencemar Udara atau (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pengukuran kualitas udara pada setiap tahunnya dan memberikan Informasi kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan dapat diketahui dengan segera melalui papan display yang berada di tempat-tempat strategis,

perubahan akan terjadi setiap pukul 15.00 WIB.

Pihak-pihak yang terkait berperan membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan memberikan informasi kualitas udara.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Optimalisasi fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian :**

- 1) Mengetahui Optimalisasi fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

##### **Manfaat Penelitian :**

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terutama

pada program pengadaan papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

2. Bagi Peneliti

Untuk meperluas wawasan dari peraturan kementerian lingkungan hidup tentang pengadaan papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Riau

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui optimalisasi kebijakan pemerintah terhadap pengadaan papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru serta sebagai informasi untuk mengetahui kualitas udara yang terjadi di lingkungan.

4. Bagi Administrasi Nrgara

Sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi teman-teman administrasi negara yang ingin melakukan penelitian sekaligus pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini.

**D. Konsep Teori**

**1) Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (**Abidin, 2012:19**)

Easton dalam **Abidin (2012:19)** menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang wewenang pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Tidak ada suatu

organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Heglo dalam **Abidin (2012:6)** menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu analisis dari pada sebagai suatu rumusan kata-kata. Oleh karena itu isi dan suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analisis dari pada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Beberapa isi dari kebijakan itu adalah sebagai berikut :

- a. Isi yang pertama adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
- b. Kedua adalah rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- c. Ketiga adalah program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- d. Keempat adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Kelima adalah dampak yang timbul dan suatu program dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang

bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. (Nugroho 2014:357).

Kebijakan publik memiliki dua aliran dalam pemahamannya (Nugroho 2014:42), yaitu :

- a. *Kontinentalis*, cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi diantara institusi-institusi negara.
- b. *Anglo-Saxonis*, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi negara dan publik.

Pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik adalah produk aktifitas-aktifitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktifitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Jenis kebijakan publik secara generik adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan formal
- b) Kebijakan umum lembaga politik yang telah diterima bersama (konvensi)

c) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

d) Perilaku pejabat publik

Kebijakan publik memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu :

- a) Formulasi kebijakan
- b) Implementasi kebijakan
- c) Evaluasi kebijakan

## 2) **Optimalisasi**

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik. Jadi optimalisasi secara umum adalah proses pencapaian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas. Optimalisasi menurut Singiresu S.Rao (2009) dalam Pratama (2013) dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia KKBI bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadipaling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu menjadi paling baik. Sedangkan maksimal adalah batas pencapaian paling baik atau paling tinggi.

Menurut **Winardi (2003)** optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian diatas tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. dalam penyelenggara organisasi senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil efektif dan efisien agar optimal.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan menggunakan teori Kreech, S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey hal ini karena teori tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi terutama pada efektifitas dan efisiensi kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap fungsi ISPU. Menurut Kreech, S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey ada empat ukuran efektifitas, yaitu sebagai berikut : Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, intensitas yang akan mencapai. Dari teori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa fungsi ISPU akan berfungsi dengan optimal jika dalam pelaksanaan kebijakannya terdapat ukuran-ukuran efektifitas.

### 3) Organisasi

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal berbagai jenis organisasi yang mempengaruhi semua tingkatan kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan diantara kita menjalani sebagian besar dalam kehidupan organisasi (sedikitnya dipengaruhi oleh berbagai macam organisasi).

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan didalam kehidupan manusia apalagi dalam kehidupan modern. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan yang dapat dilaksanakan hal-hal atau kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa organisasi membantu masyarakat dalam mengetahui kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan.

Menurut Siagia dalam **Hasibuan (2008:27)** mendefinisikan organisasi yaitu : “Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”.

Manullang dalam **Hasibuan (2008:68)**, pengertian organisasi dapat dibedakan:

1. Organisasi dalam arti badan, yaitu sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan atau struktur, yaitu gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat di dalamnya untuk pencapaian suatu tujuan.

Menurut Hasibuan dalam **Badrudin (2013 : 116)** macam-macam organisasi dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses pembentukannya
  - a. Organisasi formal
  - b. Organisasi informal

Berdasarkan kaitan hubungan dengan pemerintah

- a. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk dengan pemerintah dan atau harus terdaftar pada Lembaran Negara.
  - b. Organisasi tidak resmi yaitu organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan atau tidak terdaftar pada lembaran Negara, seperti organisasi-organisasi swasta, mungkin juga organisasi yang dibentuk pemerintah tetapi merupakan unit-unit yang sifatnya swasta.
2. Berdasarkan skala (ukuran) besar kecilnya
- a. Organisasi besar
  - b. Organisasi sedang (menengah)
  - c. Organisasi kecil
3. Berdasarkan tujuannya
- a. Publik organization (organisasi sosial) yaitu organisasi non profit yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi laba.
  - b. Business organization (organisasi perusahaan) adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial (mendapatkan laba) dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba (*profit motive*).
4. Berdasarkan *organization chart*-nya
- a. Berbentuk segitiga vertical (*arrangement chart*)
  - b. Berbentuk segitiga horizontal
  - c. Berbentuk kerucut vertical/horizontal
  - d. Berbentuk lingkaran dan atau setengah lingkaran
  - e. Berbentuk bulat telur (oval)
5. Berdasarkan tipe-tipe/bentuknya

- a. Organisasi lini (*lini organization*)
- b. Organisasi lini dan staff (*lini dan staff organization*)
- c. Organisasi fungsional (*functional organization*)
- d. Organisasi lini, staff dan fungsional (*lini, staff and functional*)
- e. Organisasi komite (*committees organization*)

Pendapat lain dari Chester L. Barnard dalam **Thoha (2007 : 114)** Organisasi adalah sebagai sebuah sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Menurut **Subekhi dan Jahuar (2013:127)** dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi yang sangat perlu diperhatikan dalam organisasi yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaporan
4. Pengawasan

Menurut **Subekhi dan Jahuar (2013:127)** ciri-ciri suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan
2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
3. Secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun
4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat didefinisikan

**Winardi (2006 :16)** mengatakan bahwa sebuah organisasi merupakan sistem yang terdiri dari elemen atau subsistem diantara dimana subsistem

manusia mungkin merupakan subsistem terpenting dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Lane dalam **Sutarto (2006 : 23)** mengatakan organisasi adalah proses menggabungkan pekerjaan yang orang-orang atau kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggaraan yang efisien, teratur, positif dan terkoordinasikan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (**Moleong 2012:4**), penelitian dengan kualitatif ini kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). (**Moleong 2012:11**) metode penelitian deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru khususnya di kantor Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru. Pertimbangan pemilihan kota

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengadaan indeks standar pencemar udara (ISPU) oleh karena itu kebijakan pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru perlu optimalisasi untuk mengetahui sejauh mana tugas-tugas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah di Badan Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dalam pengadaan indeks standar pencemar udara (ISPU).

### **3. Informan Penelitian**

Informan atau key informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterampilan pada peneliti. Informan adalah salah satu istilah yang memberikan pengertian kepada subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi kepada peneliti. Dengan kata lain informan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian.

Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu

seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. **Sugiyono (2013:39)** Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Laboratorium Pemantau Udara
2. Staff Pengendalian Pencemaran Udara
3. Staff Honorer Laboratorium Pemantau Udara
4. Masyarakat Pelajar
5. Masyarakat Umum

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dan diperoleh dari sumber data. Penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang menjadi objek penelitian, yakni evaluasi optimalisasi kebijakan pemerintah kota Pekanbaru tentang fungsi indeks standar pencemar udara oleh Badan Lingkungan Hidup.

##### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung Data ini diperoleh dari buku, arsip, literatur data Laboratorium Pemantau udara dan data Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang menunjang penelitian ini berupa :

- a) Data tentang Kualitas Udara beberapa tahun belakangan ini
- b) Data pedoman teknis perhitungan laporan serta informasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat perlu teknik pengumpulan data yang tepat, cepat, dan efisien. Pengumpulan data dan informasi

dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan (*passive participation*) yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data dari tempat kegiatan penelitian yang diamati. Tetapi peneliti tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
2. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab langsung terhadap informan penelitian yaitu Kepala laboratorium pemantau udara, staff pengendalian pencemaran udara, honorer laboratorium pemantau udara (ISPU) sebagai indicator penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis yang dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang bagaimana Evaluasi optimalisasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Badan Lingkungan Hidup.

#### **6. Analisis Data**

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan dalam menulis ini adalah kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan. Jadi teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang akan di teliti atau dijelaskan apa adanya sehingga akan mendapatkan suatu pemahaman.

Analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan tentang hasil

penelitian yang berhubungan dengan optimalisasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang didapatkan dari wawancara dan observasi peneliti lalu disajikan dalam bentuk table dan dianalisis setiap indicator secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Optimalisasi Fungsi Papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 4 ayat (6) dinyatakan bahwa terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berisi :

*“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.*

Selanjutnya Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor Kep-107/ KABAPEDAL/11/1997 tentang pedoman teknis perhitungan dan

pelaporan serta informasi Indeks standar Pencemar Udara (ISPU) pasal 9 berbunyi : “Penyampaian Indeks Standar pencemar Udara (ISPU) kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan melalui : media massa dan elektronika (radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lainnya), papan peraga pada tempat-tempat umum.

Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penghitungan dan pelaporan serta informasi Indeks standar Pencemar Udara (ISPU). ISPU adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari.

Saat ini diberbagai daerah di Riau sudah terpasang alat pengukur kualitas udara atau *air quality meter*. Dengan alat ini, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dapat diketahui, sehingga kita ataupun pemerintah dapat mengambil keputusan terkait hal-hal mempengaruhi kesehatan.

Papan peraga yang berada ditempat-tempat umum adalah salah satu sarana yang diberikan Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait kondisi udara.Pekanbaru memiliki dua papan indeks standar pencemar udara (ISPU).Masing-masing berada di Jalan Tambusai-Soekarno Hatta dan Jalan Sudirman, keduanya kini berfungsi dengan baik.

*“Beliau membenarkan bahwa kota Pekanbaru sudah memiliki dua papan ISPU, kedua papan tersebut sampai*

*saat ini masih berfungsi dengan baik, masyarakat Pekanbaru bisa melihat kondisi udara pada papan ISPU baik di Jalan Tambusai-Soekarno Hatta juga di Jalan Sudirman”.*(**Wawancara dengan Kepala Laboratorium Pemantau Udara, 20 Juni 2017**)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Laboratorium Pemantau Udara menyatakan bahwa Kota Pekanbaru sudah memiliki dua papan ISPU yang berfungsi untuk menerangkan kondisi udara kepada masyarakat, ISPU dapat digunakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat namun tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai sarana peringatan dini bagi masyarakat. Pada perhitungan data ISPU, tidak kemungkinan menutup kemungkinan adanya data-data yang hilang. Presentase kehilangan data yang terjadi di tiap stasiun pemantauan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peralatan yang rusak, keterbatasan biaya operasional, dan minimnya petugas operasional, sehingga perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi ISPU tersebut.

### **1) Perencanaan**

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

*“Kami sudah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan*

*memberikan informasi serta menjelaskan fungsi dari ISPU ini, waktu pertama ISPU ini mulai beroperasi dan juga ketika kondisi udara membahayakan seperti kabut asap yang terjadi di Kota Pekanbaru untuk masyarakat yang pelajar kami juga ke sekolah ataupun kamus mereka untuk menjelaskan fungsi dari papan ISPU bagi masyarakat”*(**Wawancara dengan Kepala Laboratorium Pemantau Udara, 20 Juni 2017**)

### **2) Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruang kerja administrasi, ruang laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendegalisasian wewenang dan seterusnya dalam rangka mencapai tujuan. Dari penjelasan diatas pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ialah pemerintah sudah membangun laboratorium pemantau udara, dan sudah menetapkan tugas dan wewenang di bidangnya masing-masing

*“Kendala kurang optimal fungsi papan ISPU ini sebernarnya karena minimnya jumlah alat pemantau udara atau papan ISPU yang kita miliki, di kota Pekanbaru masih ada dua papan ISPU seharusnya ditempat-tempat strategis juga harus dipasang alat pemantau udara ini, seperti di daerah panam itu harusnya sudah ada papan ISPU karena daerah Panam itu termasuk daerah yang memiliki jumlah*

kepadatan yang tinggi. Tapi akibat besarnya anggaran untuk pemasangan alat ini sehingga Pemerintah belum memasang alat ini di daerah tersebut. Seandainya sudah ada alat ini kan juga memudahkan masyarakat daerah panam untuk mengetahui kondisi udara”(Wawancara dengan Kepala Laboratorium Pemantau udara. 20 Juni 2017)

### 3) Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan yang tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Pengawasan harus disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi dan oleh yang diawasi maupun oleh masyarakat umum. Lebih tegasnya lagi pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pemberdayagunaan aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Sejauh ini dari pengawasan yang kami lakukan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), terlihat jelas banyak masyarakat di Kota Pekanbaru tidak peduli dengan kesehatan mereka. Contohnya masyarakat yang melewati jalanan yang berpolusi tidak menggunakan masker, bahkan seperti kasus kabut asap yang terjadi di Riau masyarakat tetap melakukan aktivitas diluar ruangan tanpa menggunakan masker padahal katagori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam angka

berbahaya”(Wawancara dengan Kepala Laboratorium Pemantau udara. 20 Juni 2017)

### 4) Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggungjawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

“Tentu saja kami harus membuat laporan, baik laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan bawahan kepada atasan, sampai laporan kepada masyarakat, seperti yang kami sampaikan laporan kondisi udara pada papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)”. (Wawancara dengan Kepala Laboratorium Pemantau udara. 20 Juni 2017)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalkan fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat

terkait kondisi udara dinilai masih lemah. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan juga kurangnya fasilitas seperti alat pemantau udara atau papan ISPU di setiap tempat-tempat strategis membuat upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Laboratorium Pemantau Kualitas Udara kurang terlaksana dengan baik. Meskipun papan ISPU yang sudah ada dan berfungsi dengan baik dan juga kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah hampir mencapai hasil maksimal namun tetap saja fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kurang optimal.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah : 1) faktor internal yaitu, kurangnya anggaran biaya untuk pemasangan papan ISPU di setiap daerah-daerah yang membutuhkan, 2) faktor eksternal yaitu masyarakat Kota Pekanbaru hanya memperhatikan papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) jika kondisi udara sudah memburuk atau sudah masuk katagori berbahaya dalam arti cuaca terlihat gelap, jika udara masih terlihat bersih masyarakat menganggap papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) itu hanya sekedar papan hias.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan memberikan sarana dan prasarana

bagi masyarakat dengan memberikan anggaran untuk pembangunan alat pemantau udara seperti papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

2. Masyarakat lebih peka terhadap sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah dan paham fungsi dari setiap pelaksanaan baik kebijakan maupun pembangunan fisik dan nonfisik yang dilakukan pemerintah sehingga setiap tujuan pemerintah bisa tercapai terutama pada fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat sehingga masyarakat yang belum mengetahui fungsi papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan baik dan agar masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said, Zainal.2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humnika.
- Badrudin. 2013. *Dasar-DasarManajemen*. Bandung. Alfabeta
- Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas kelompok*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *ManajemenSumberDayaManusia*. Jakarta. PT. BumiAksara.
- Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2006.

- Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta. PT. Erlangga.
- Mashun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktek*. Jakarta. Grasindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta. Ellex Media Komputindo.
- Passolong., Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rao, Singeresu S. 2009. *Engineering Optimization Theory and Practice*. New Jersey: Jhon Wiley and Sons, Inc.
- Subekhi, A. dan Jahuar Muhammad. 2013. *Pengantar Teori dan Peerilaku Organisasi*. Jakarta. PT. Prestasi Pustaka Karya.
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasi)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persda.
- Usmarab, Antoninadan Lukas Dwiantara. 2004. *Strategi Organisasi*. Yogyakarta. Amara Books.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winardi. 2003. *entrepreneur and Entrepreneurship*, Cetakan Kedua. Jakarta. CV Kencana.
- Winardi. 2006. *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. CAPS

#### **Dokumen :**

Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabepedal/11/1997

#### **Karya Ilmiah:**

Insyira, Putri. 2016. Evaluasi Kerja Badan Lingkungan Hidup Dalam Uji Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fisip, Universitas Riau, Pekanbaru.